



Analisis Determinasi Kualitas Laporan Keuangan dan Hubungannya dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Kota Jambi

Arisman^{a,*}

^a Program Studi Akuntansi Komputer, Politeknik Jambi, Jl. Lingkar Barat II Kota Jambi, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima 15 Desember 2017
Diterima setelah direvisi 22 Januari 2018
Disetujui 26 Februari 2018

Kata kunci:

Analisis determinasi
Laporan Keuangan
Laporan Akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (LAKIP)

Abstract-The Research sample are head departments/ sub departments/accounting section f at local government activity unit (SKPD) in Jambi, The Research data are collected from with purposive sampling. The research Resultsf in Kendall'W showing that there is asignificant positive correlation between the Government accounting standart, human resources, utilization of technology and accountinginternal control to the quality of local government financial reports meanwhile the reank Spearman test showing that application Government accounting standard, human resources, and accountinginternal control to the quality of local government financial reports partly when the utilization of technology has no correlation to quality local government financial reports and there is no correlation between quality local government financial reports with accountability government office performance report.(LAKIP) at local government activity unit (SKPD) in Jambi.

Intisari-Sampel penelitian adalah kepala departemen / sub departemen / bagian akuntansi di unit kerja pemerintah daerah (SKPD) di Jambi, Data penelitian dikumpulkan dari dengan purposive sampling. Hasil penelitian di Kendall'W menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara standar akuntansi Pemerintah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan akuntansi kontrol internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan uji reank Spearman menunjukkan bahwa aplikasi standar akuntansi Pemerintah, sumber daya, dan akuntansi pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagian ketika pemanfaatan teknologi tidak memiliki korelasi dengan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dan tidak ada korelasi antara laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dengan laporan kinerja kantor pemerintah yang akuntabel. (LAKIP) di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di Jambi.

1. Pendahuluan

Sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP

merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas public dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

* Corresponding Author:

E-mail: arisman@politeknikjambi.ac.id (Arisman)

sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik [1].

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain: relevan, andal, dapat dipahami dan dibandingkan. Penelitian yang dilakukan Nugraheni dan Subaweh (2013) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang undangan, maka akan menimbulkan permasalahan.

Dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2014, dinyatakan bahwa terhadap 444 LKPD yang diperiksa, BPK hanya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 153 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 264 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 9 entitas, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 18 entitas. Perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2009 sampai tahun 2013 menunjukkan peningkatan kualitas yang tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2009, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian hanya sebanyak 15 LKPD, tahun 2010 sebanyak 34 LKPD, tahun 2011 sebanyak 67 LKPD, tahun 2012 sebanyak 120 LKPD, tahun 2013 153 LKPD. Meskipun terdapat kenaikan proporsi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diikuti penurunan proporsi opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kualitas dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar.

Berdasarkan hasil pemeriksanaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengemukakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013 di Provinsi Jambi. Hasilnya, delapan dari sebelas pemerintah daerah di Jambi mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hanya tiga pemerintah daerah yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Batanghari.

Laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut Kota Jambi pada tahun 2013 belum bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian disebabkan karena pengelolaan asset yang belum terpenuhi. Selain itu juga implikasi sistim pengendalian intern pengelolaan dan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan PILKADA Kota Jambi belum memadai (bpk.go.id)

Selain itu untuk dapat menghasilkan laporan yang mempunyai nilai maka diperlukan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana Penelitian yang dilakukan Winidyaningrun (2009) bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pada PEMDA

SUBOSUKAWONOSRATEN. Daniel dan Yohanes (2013), juga menyatakan bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah Pemerintah Tual [2].

Hal lain yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Penelitian yang dilakukan Winidyaningrun (2009) bahwa pemanfaatan teknologi memiliki pengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, dan kemampuan *multiprocessing*. Namun, pengimplementasian teknologi informasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, apabila teknologi informasi tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara optimal, maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Selain itu, terdapat kendala yang ditemui dalam penerapan teknologi informasi, yaitu yang berkaitan dengan kondisi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana.

Selain itu yang mungkin mempengaruhi Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pengendalian intern akuntansi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dipenuhinya peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini replikasi dari penelitian Winidyaningrun (2009) tentang pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi, perbedaannya adalah peneliti mengambil populasi pada satuan kerja perangkat daerah yang ada di Kota Jambi, selain itu peneliti menggunakan 4 variabel independen yaitu standar akuntansi pemerintah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, pengendalian intern akuntansi untuk menganalisis kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan perangkat kerja daerah di Kota Jambi. Dari

uraian yang dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti analisis determinasi kualitas laporan keuangan dan hubungannya dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penelitian ini akan dilakukan pada SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Jambi

1.1 Kajian teoritis dan pengembangan hipotesis

Kajian teoritis dan pengembangan hipotesis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada tahun 2010 selesai disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Implementasi dari peraturan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Paling lambat tahun 2015, seluruh laporan keuangan daerah sudah menerapkan SAP berbasis akrual.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2010:21) peranan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi. Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sampai dengan tahun anggaran 2013, pemerintah daerah masih menerapkan SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan fundamental Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful*. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP.

Penyimpangan dan kebocoran yang masih ditemukan di dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum

memenuhi karakteristik/nilai informasi yaitu keterandalan. Penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern akuntansi (Hevesi, 2005 dalam Winidyaninrum (2009). Pengendalian akuntansi juga akan sangat membantu mempercepat penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut menjadi tepat waktu [3]. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki ketrampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

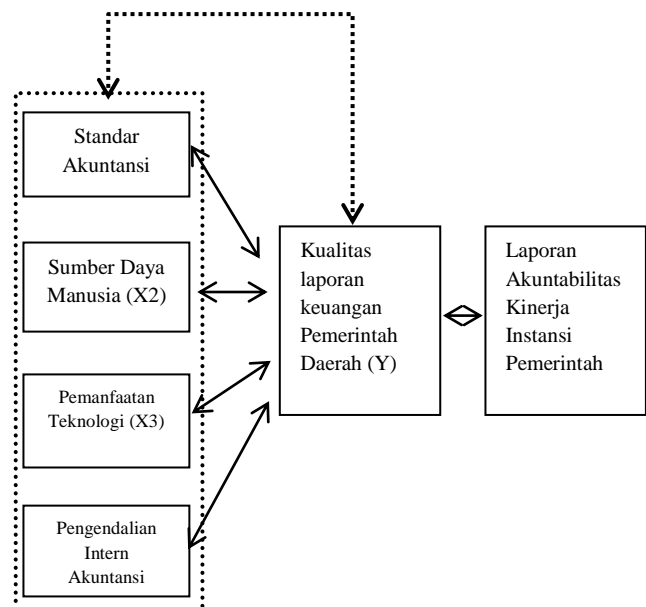
Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu, semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan [1]

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dijelaskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian Intern Akuntansi berhubungan dengan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan.
- H2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian Intern Akuntansi berberhubungan dengan Kualitas Laporan Keuangan secara parsial.
- H3. Factor yang paling berhubungan dengan kualitas laporan keuangan
- H4. Kualitas Laporan Keuangan berhubungan positif terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Gambar 1. Model Penelitian

Dalam penelitian ini, semua populasi dijadikan sebagai sampel. Jumlah responden sebanyak 3 orang yang bekerja dibagian akuntansi di 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Jambi yaitu kepala Bagian atau Seksi akuntansi dan staf Bagian atau Seksi akuntansi. Jumlah responden semua adalah 81 orang.

2. Metode Penelitian

2.1 Sampel dan data penelitian

Teknik statistik non parametrik yang digunakan adalah uji Konkordansi Kendall W. Koefisien Konkordansi Kendall W merupakan ukuran derajat keeratan atau keselarasan hubungan diantara k variabel yang diukur minimal dalam skala ordinal. Nilai pengamatan pada setiap baris diranking dan diurutkan rata-ratanya (*mean rank*), yang dapat dihitung dengan rumus [4] :

$$Mean\ rank = \frac{R_i}{n} \tag{1}$$

Dengan : $R_i = \sum_{i=1}^n X_i$ (2)

Dimana:

- n = jumlah responden
- R_i = jumlah data penilaian responden
- X_i = nilai pengamatan yang diperoleh dari responden

Setelah diperoleh nilai Mean Rank selanjutnya dilakukan perhitungan statistik Kendall W yang ditentukan dengan rumus :

$$W = \frac{12\sum R_i^2 - 3n^2k(k+1)^2}{n^2k(k^2-1)} \tag{3}$$

Dimana :

- R_i = jumlah data penilaian responden
- k = jumlah variabel (Kualitas laporan Keuangan, SAP, SDM. PI, dan PIA)
- n = jumlah responden (Jumlah SKPD di Kota Jambi)

Untuk dapat memberikan interpretasi terhadap kuatnya hubungan tersebut, maka dapat digunakan pedoman seperti yang tertera pada tabel dibawah :

Tabel 1
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.000 s/d 0.199	Sangat Rendah
0.200 s/d 0.399	Rendah
0.400 s/d 0.599	Sedang
0.600 s/d 0.799	Kuat
0.800 s/d 1.000	Sangat Kuat

Langkah selanjutnya adalah dilakukan uji hipotesis. Secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian (statistik). Jadi maksudnya adalah taksiran keadaan populasi mengenai data sampel. Dalam statistic yang di uji adalah hipotesis nol. Hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan stasistik

Pengambilan keputusan/pengujian hipotesis :

1. Membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel, dengan ketentuan :
 - Jika statistik hitung < statistik tabel, maka Ho diterima
 - Jika statistik hitung > statistik tabel, maka Ho ditolak
 - 1) Statistik Hitung
Dipakai perhitungan *Chi-Square* dengan rumus :
 $X^2 = [n (k-1)] \times W$
Dimana :
N = jumlah responden
k = jumlah variable
 - 2) Statistik Tabel
Dengan melihat tabel *Chi-Square*, nilai df (derajat kebebasan) dan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, maka akan diperoleh nilai statistik tabel
2. Berdasarkan Probabilitas (*AsymptoticSignificance*), dengan ketentuan :
 - Jika probabilitas > 0.05, maka Ho diterima
 - Jika probabilitas < 0.05, maka Ho ditolak

2.2 Korelasi Spearman Rank

Korelasi Spearman Rank digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji sognifikansi hipotensi asosiatif bisa masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal, dan sumber data variabel tidak harus sama [4]

Rumus yang digunakan dalam anlisis korelasi Korelasi Spearman Rank adalah :

$$\rho = 1 - \frac{6\sum b_i^2}{n(n^2-1)} \tag{4}$$

Dimana :

- ρ = Koefisiensi Korelasi Spearman Rank
- n = Jumlah Sampel

3 Hasil dan Pembahasan

3.1. Hubungan Penerapan standar akuntansi Pemerintah, sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian Intern Akuntansi dengan Kualitas Laporan Keuangan.

Pada bagian ini akan diuji hubungan penerapan akuntansi pemerintah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern akuntansi dengan kualitas laporan keuangan. Pengujian dilakukan menggunakan statistic non parametik dengan alat uji *Kendall's W*.

Dari hasil olah data dengan menggunakan *Software IBM SPSS 22* diperoleh hasil uji statistic sebagai berikut:

Tabel 2

Hasil Uji Statistik *Kendall's W*

Test Statistics	
N	27
Kendall's W ^a	.683
Chi-Square	73.791
Df	4
Asymp. Sig.	.000

a. Kendall's Coefficient of Concordance

Sumber : data olahan 2015

Dari Tabel 2 diatas dapat di jelaskan bahwa nilai N = 27 adalah banyaknya data pengamatan, yaitu 27 SKPD di Kota Jambi. Nilai *Chi Square* sebesar 73.791 lebih besar dari r table pada df 4 yaitu 9.488. Nilai *Asymptotic Significane (Probilitas)* sebesar 0.000 atau lebih kecil dari 0.05. Dari angka tersebut terlihat adanya hubungan yang signifikan positif antara penerapan akuntansi pemerintah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama dengan kualitas laporan keuangan Daerah dengan tingkat keyakinan 95%. Nilai uji *Kendall's W* sebesar 0.683. Angka ini berada antara 0,600 – 0.799, yang menunjukkan bahwa antara variabel penerapan akuntansi pemerintah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama memiliki hubungan yang kuat dengan kualitas laporan keuangan Daerah.

3.2 Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Laporan Keuangan

Untuk mengetahui hubungan penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan Daerah dilakukan Uji Korelasi *Rank Spearman*. Dari hasil olah data dengan seperti pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3

Hasil Uji Korelasi *Rank Spearman* Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan.

		Correlations	
		KUALITA	
		SAP	S LK
Spearman's rho	SAP	1.000	.348*
	Correlation Coefficient		
	Sig. (1-tailed)	.	.037

	N	27	27
KUALITAS LK	Correlation Coefficient	.348*	1.000
	Sig. (1-tailed)	.037	.
	N	27	27

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Sumber: data olahan 2015

Dari Tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa besarnya korelasi antara penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan Daerah adalah sebesar 0.348. *signifikan (sig)* sebesar 0.037 atau kurang dari 0.05, yang berarti menunjukkan bahwa korelasi antara penerapan standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan Keuangan Daerah signifikan dengan tingkat kepercayaan 95%.

3.3 Hubungan Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Untuk mengetahui hubungan antara sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan Daerah dilakukan Uji Korelasi *Rank Spearman*. Dari hasil olah data dengan menggunakan *Software IBM SPSS 22*, diperoleh data seperti pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4

Hasil Uji Statistik Korelasi *Rank Spearman* Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan

		Correlations		
		KUALIT		
		SDM	AS LK	AS LK
Spearman's rho	SDM	1.000	.479**	
	Correlation Coefficient			
	Sig. (1-tailed)	.	.006	
	N	27	27	
	KUALIT AS LK	.479**	1.000	
	Correlation Coefficient			
	Sig. (1-tailed)	.006	.	
	N	27	27	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Sumber: data olahan 2015

Dari Tabel 4 diatas, dapat diketahui bahwa besarnya korelasi antara sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan Daerah adalah sebesar 0.479. Selain itu terlihat juga dari angka *Significane (sig)* sebesar 0.006 atau kurang dari 0.05, menunjukkan bahwa korelasi antara sumber daya manusia dengan kualitas laporan Keuangan Daerah signifikan.

3.4 Hubungan Pemanfaatan Teknologi dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Untuk mengetahui hubungan pemanfaatan teknologidengan kualitas laporan keuangan aksesibilitas laporan keuangan Daerah dilakukan Uji *Rank Spearman*. Dari hasil olah data dengan menggunakan *Software IBM SPSS 22*, diperoleh hasil tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5

Hasil Uji Statistik Korelasi Rank Spearman Pemanfaatan Teknologi dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Correlations			KUALITAS	
			PT	LK
Spearman's rho	PT	Correlation	1.000	.271
		Coefficient		
		Sig. (1-tailed)	.	.086
		N	27	27
KUALIT AS LK	AS LK	Correlation	.271	1.000
		Coefficient		
		Sig. (1-tailed)	.086	.
		N	27	27

Sumber: data olahan 2015

Dari Tabel diatas 5 diatas, dapat diketahui bahwa besarnya korelasi antara Pemanfaatan Teknologidengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah sebesar 0.271. *Significane (sig)* sebesar 0.086 atau lebih dari 0.05, yang berarti menunjukkan bahwa korelasi pemanfaatan teknologi dengan kualitas laporan keuangan Daerah tidak signifikan.

3.5 Hubungan Pengendalian Intern Akuntansi dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Untuk mengetahui hubungan pengendalian Intern akuntansidengan kualitas laporan keaangan dilakukan Uji Rank Spearman. Dari hasil olah data dengan menggunakan *Software IBM SPSS 22*, diperoleh hasil tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6

Hasil Uji Statistik Korelasi Rank Spearman Pengendalian Intern Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan

Correlations			PIA	KUALITAS LK
Spearman's rho	PIA	Correlation	1.000	.390*
		Coefficient		
		Sig. (1-tailed)	.	.022
		N	27	27
KUALIT AS LK	AS LK	Correlation	.390*	1.000
		Coefficient		
		Sig. (1-tailed)	.022	.
		N	27	27

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Sumber: data olahan 2015

Dari Tabel diatas 6 diatas, dapat diketahui bahwa besarnya korelasi antara pengendalian intern akuntansi dan kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah sebesar 0,390. *Significane (sig)* sebesar 0.022 atau kurang dari 0.05, yang berarti menunjukkan bahwa korelasi pengendalian intern akuntansi dan kualitas Laporan Keuangan Daerah signifikan.

3.6 Hubungan Kualitas Laporan Keuangan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk mengetahui hubungan antara kualitas laporan keuangan dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan Uji Korelasi Rank Spearman. Dari hasil olah data dengan menggunakan *Software IBM SPSS 22*, diperoleh data seperti pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7

Hasil Uji Statistik Korelasi Rank Spearman Kualitas Laporan Keuangan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Correlations			KUALITAS LK	LAKIP
Spearman's rho	KUALI TAS LK	Correlation	1.000	-.059
		Coefficient		
		Sig. (1-tailed)	.	.385
		N	27	27
LAKIP	LAKIP	Correlation	-.059	1.000
		Coefficient		
		Sig. (1-tailed)	.385	.
		N	27	27

Sumber: data olahan 2015

Dari Tabel 7 diatas, dapat diketahui bahwa besarnya korelasi antara kualitas laporan Keuangan Daerah dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar - 0.056. *significan (sig)* sebesar 0.385 atau lebih dari 0.05, yang berarti menunjukkan bahwa korelasi kualitas laporan Keuangan Daerah dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak signifikan

4 Simpulan

Kesimpulan dari hasil pengolahan dan pembahasan data adalah sebagai berikut:

- 1 Secara simultan standar akuntansi pemerintah, sumber daya manusia. Pemanfaatan teknologi, pengendalian intern akuntansi berhubungan positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
- 2 Penerapan standar akuntansi pemerintah, sumber daya manusia, dan pengendalian intern akuntansi berhubungan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan pemanfaatan teknologi tidak berhubungan atau tidak signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- 3 Faktor yang paling berhubungan terhadap kualitas laporan keuangan adalah sumber daya manusia dengan besaran korelasi 0.479
- 4 Kualitas laporan keuangan tidak ada hubungan atau tidak signifikan dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Referensi

- [1] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006.
- [2] Winidyaningrum, *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian*

Intern Akuntansi (Studi Empiris Penda SUBOSUKAWONSRATEN), Tesis,
Surakarta, 2009.

- [3] Mulyadi, *Auditing Edisi 6*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2010.
[4] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2008.